



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG  
PENGGOLOONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, maka untuk kejelasan status kepemilikan dan penggunaan barang pada masing-masing unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Peorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPDR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara sebagai Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub-sub rincian objek.
7. Kodifikasi Barang adalah Pemberian kode Barang Milik Daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Daerah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah selaku pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah Kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengurus Barang adalah Pejabat yang disertai tugas mengurus Barang.
13. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan barang.
14. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada pengguna barang.
15. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dan menyimpan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada pengelola barang.
16. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dan menyimpan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kodifikasi Barang;
- b. Kode Lokasi; dan
- c. Kode Register.



### Pasal 3

Kodefikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dicantumkan pada setiap barang inventaris kecuali ruang atau tempat yang tidak tersedia tidak dapat memuat label kode barang cukup dicatat kedalam buku inventaris atau Kartu Inventaris Ruangan ( KIR).

## BAB III KODEFIKASI BARANG

### Pasal 4

Kodefikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditujukan bagi semua Unit Kerja Daerah dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek Barang Milik Daerah.

### Pasal 5

Kodefikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Level 1 menunjukkan kode akun;
- b. Level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. Level 3 menunjukkan kode Jenis;
- d. Level 4 menunjukkan kode objek;
- e. Level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. Level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan
- g. Level 7 menunjukkan sub -sub rincian objek.

## BAB IV KODE LOKASI

### Pasal 5

Kode Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditujukan bagi satuan perangkat daerah dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan kode lokasi masing-masing barang milik daerah.

### Pasal 6

(1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. barang milik pemerintah pusat (kode 00);
- b. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11);
- c. barang milik pemerintah daerah (kode 12); dan
- d. barang milik lainnya (kode 13).

(2) kode lokasi barang milik pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah provinsi.

(3) kode lokasi barang pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah kabupaten.



- (4) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d digunakan oleh pemerintah kabupaten Buton utara dan apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah provinsi, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah daerah.

## BAB V KODE REGISTER

### Pasal 7

Kode register sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c meliputi Kode lokasi dan tahun perolehan dan kode barang dan nomor urut pendaftaran.

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kode Lokasi dan Kode Barang Lingkup Kabupaten Buton Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Di tetapkan di Buranga  
pada tanggal 6-3-2018

BUPATI BUTON UTARA,



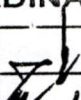

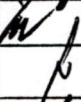
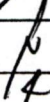

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 6-3-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD YASIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. 	
BAGIAN HUKUM	
BKD	



NOMOR : 12 TAHUN 2018

TANGGAL : 6-3-2018

TENTANG : PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NO	SKPD/PENGGUNA/KUASA PENGGUNA DAN SUB KUASA PENGGUNA	KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG	KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL	KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN	KODE PENGGUNA BARANG	KODE KUASA PENGGUNA BARANG	KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG	TAHUN PENGADAAN
1	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
	- BUPATI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0
	- WAKIL BUPATI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0
	- SEKDA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 0 3	0 0 0 0 3	0 0 0 0
	- AJUDAN BUPATI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 0 4	0 0 0 0 4	0 0 0 0
	- AJUDAN WAKIL BUPATI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 0 5	0 0 0 0 5	0 0 0 0
	- RESEPSIONER SEKDA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 0 6	0 0 0 0 6	0 0 0 0
	- ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 0 7	0 0 0 0 7	0 0 0 0
	- ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 0 8	0 0 0 0 8	0 0 0 0
	- ASISTEN ADMINIISTRASI UMUM	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 0 9	0 0 0 0 9	0 0 0 0
	- KABAG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 1 0	0 0 0 1 0	0 0 0 0
	- KABAG HUKUM	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 1 1	0 0 0 1 1	0 0 0 0
	- KABAG KESEJAHTRAAN RAKYAT	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 1 2	0 0 0 1 2	0 0 0 0
	- KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 1 3	0 0 0 1 3	0 0 0 0
	- KABAG PEREKONOMIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 1 4	0 0 0 1 4	0 0 0 0
	- KABAG PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 1 5	0 0 0 1 5	0 0 0 0
	- KABAG UMUM	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 1 6	0 0 0 1 6	0 0 0 0
	- KABAG ORGANISASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 1 7	0 0 0 1 7	0 0 0 0
	- KABAG PROTOKOL, KERJA SAMA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 1 8	0 0 0 1 8	0 0 0 0
	- STAF AHLI BUPATI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 1 9	0 0 0 1 9	0 0 0 0
	- DST.	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 1	0 0 0 2 8	0 0 0 2 8	0 0 0 0
2	KECAMATAN KULISUSU	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 4	0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0
	- CAMAT	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 4	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0
	- SEKRETARIS CAMAT	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 1 0 4	0 0 0 0 3	0 0 0 0 3	0 0 0 0



NO SKPD/PENGGUNA/KUASA PENGGUNA DAN SUB KUASA PENGGUNA		KODE STATUS KEPEMILIKAI BARANG		KODE INTRAKONTABEL DAI EKSTRAKONTABEL		KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN		KODE PENGGUNA BARANG				KODE KUASA PENGGUNA BARANG				KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG				TAHUN PENGADAAN			
	- KELURAHAN BANGKUDU	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	- KELURAHAN LIPU	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	8	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
	- KELURAHAN LAKONEA	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	- KELURAHAN LEMO	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	1	4	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
	- KELURAHAN BONE LIPU	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	1	4	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
	- KELURAHAN WANDAKA	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	1	4	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
	- KELURAHAN SARAEA	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	- DST	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	1	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
3	KECAMATAN KULISUSU UTARA	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- CAMAT KULISUSU UTARA	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	- SEKRETARIS CAMAT	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	- DST	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
4	KECAMATAN KULISUSU BARAT	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- CAMAT KULISUSU BARAT	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	- SEKRETARIS CAMAT	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	- DST	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
5	KECAMATAN BONE GUNU	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- CAMAT BONEGUNU	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	- SEKRETARIS CAMAT	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	- KELURAHAN BONEGUNU	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	7	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
	- KELURAHAN BURANGA	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	7	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	- DST	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	7	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
6	KECAMATAN KAMBOWA	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- CAMAT KAMBOWA	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	- SEKRETARIS CAMAT	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	8	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	- KELURAHAN KAMBOWA	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	8	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
	- DST	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	8	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
7	- KECAMATAN WAKORUMBA UTARA	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- CAMAT WAKORUMBA UTARA	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	- SEKRETARIS CAMAT	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	9	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0



NO SKPD/PENGGUNA/KUASA PENGGUNA DAN SUB KUASA PENGGUNA		KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG		KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL		KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN		KODE PENGGUNA BARANG					KODE KUASA PENGGUNA BARANG					KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG					TAHUN PENGADAAN				
		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	9	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	9	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	9	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
8	SEKRETARIAT DPRD	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- KETUA DPR	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	- WAKIL KETUA	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	- WAKIL KETUA	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	- SEKRETARIS DEWAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	- KABAG UMUM DAN KEUANGAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
	- KABAG LEGISLASI DAN PERSIDANGAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0
	- KABAG PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0
	- KASUBAG TATA USAHA DAN KEHUMASAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0
	- KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0
	- KASUBAG LEGISLASI	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	- KASUBAG PERSIDANGAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	- KASUBAG PENGAWASAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	- KASUBAG PENGKAJIAN DATA PENGANGGARAN DAN PENYULUHAN PRODUK HUKUM	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	1	3	0	0	0	1	3	0	0	0	0
	- DST	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	0
9	SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI																												
	- SEKRETARIS KORPRI	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- KASUBAG UMUM DAN KERJA SAMA	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	- KASUBAG OLAHRAGA, SENI,BUDAYA, MENTAL ROHANI	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	- KASUBAG USAHA DAN BANTUAN SOSIAL	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	- DST,	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	1	0	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- KEPALA BADAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	- SEKRETARIS	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	- KABID EKONOMI	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	- KABID SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	- KABID PENGEMBANGAN WILAYAH, SARANA DAN PRASARANA	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0



NO SKPD/PENGGUNA/KUASA PENGGUNA DAN SUB KUASA PENGGUNA		KODE STATUS KEPEMILIKAI BARANG		KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL		KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN		KODE PENGGUNA BARANG					KODE KUASA PENGGUNA BARANG					KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG					TAHUN PENGADAAN				
		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0
- KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0
- KASUBAG PROGRAM		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0
- KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0
- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAAIAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- KASUBBID PENGEMBANGAN DUNIA USAHA		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
- KASUBBID EKONOMI PRODUKSI		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
- KASUBBID SOSIAL BUDAYA		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	
- KASUBBID PEENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	1	3	0	0	0	
- KASUBBID PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	
- KASUBBID PENATAAN RUANG		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	1	5	0	0	0	1	5	0	0	0	
- KASUBBID PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	1	6	0	0	0	1	6	0	0	0	
- KASUBBID PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR MASYARAKAT		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	1	7	0	0	0	1	7	0	0	0	
- KASUBBID SOSIAL BUDAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	1	8	0	0	0	1	8	0	0	0	
- KASUBBID SUMBER DAYA ALAM ,LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	1	9	0	0	0	1	9	0	0	0	
- KASUBBID INOVASI DAN TEKNOLOGI		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
- DST		1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	
11	BADAN KEUANGAN DAERAH	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- KEPALA BADAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
	- SEKRETARIS	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	
	- KABID PENDAPATAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	
	- KABID ANGGARAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	
	- KABID PERBENDAHARAAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	
	- KABID AKUNTANSI	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	
	- KABID PENGELOLAAN ASET	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	
	- KASUBAG PERENCANAAN KEUANGAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	
	- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	
	- KASUBBID PENDATAAN DAN PENETAPAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	- KASUBBID PENDAPATAN LAIN-LAIN DAN KEBERATAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
	- KASUBBID PENAGIHAN PAJAK DAN RETREBUSI	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	4	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	
	- KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	4	0	4	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	1	3	0	0	0	



NO SKPD/PENGUNA/KUASA PENGUNA DAN SUB KUASA PENGUNA		KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG	KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL	KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN	KODE PENGGUNA BARANG				KODE KUASA PENGGUNA BARANG			KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG			TAHUN PENGADAAN			
11	- KASUBBID PENYUSUNAN ANGGARAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 4	0 1	0 1	0 0	0 1	4	0 0	0 1	4	0 0	0 0	0 0	
	- KASUBBID ADMINISTRASI ANGGARAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 4	0 1	0 1	0 0	0 1	5	0 0	0 1	5	0 0	0 0	0 0	
	- KASUBBID PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 4	0 1	0 1	0 0	0 1	6	0 0	0 1	6	0 0	0 0	0 0	
	- KASUBBID PENGELUARAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 4	0 1	0 1	0 0	0 1	7	0 0	0 1	7	0 0	0 0	0 0	
	- KASUBBID VERIFIKASI DAN EVALUASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 4	0 1	0 1	0 0	0 1	8	0 0	0 1	8	0 0	0 0	0 0	
	- KASUBBID PENERIMAAN KAS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 4	0 1	0 1	0 0	0 1	9	0 0	0 1	9	0 0	0 0	0 0	
	- KASUBBID PENGELUARAN KAS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 4	0 1	0 1	0 0	0 2	0	0 0	0 2	0	0 0	0 0	0 0	
	- KASUBBID LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 4	0 1	0 1	0 0	0 2	1	0 0	0 2	1	0 0	0 0	0 0	
	- KASUBBID ANALISA KEBUTUHAN PEMANFAATAN ASET	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 4	0 1	0 1	0 0	0 2	2	0 0	0 2	2	0 0	0 0	0 0	
	- KASUBBID INVENTARISASI DAN PEMELIHARAAN ASET	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 4	0 1	0 1	0 0	0 2	3	0 0	0 2	3	0 0	0 0	0 0	
	- KASUBBID PENILAIAN DAN PENGHAPUSAN ASET	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 4	0 1	0 1	0 0	0 2	4	0 0	0 2	4	0 0	0 0	0 0	
	- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 4	0 1	0 1	0 0	0 2	5	0 0	0 2	5	0 0	0 0	0 0	
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 5	0 1	0 1	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	
	- KEPALA BADAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 5	0 1	0 1	0 0	0 0	1	0 0	0 0	1	0 0	0 0	0 0	
	- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 5	0 1	0 1	0 0	0 0	2	0 0	0 0	2	0 0	0 0	0 0	
	- KABID MUTASI, PENGADAAN DAN KEDUDUKAN HUKUM	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 5	0 1	0 1	0 0	0 0	3	0 0	0 0	3	0 0	0 0	0 0	
	- KABID PENGEMBANGAN , DOKUMENTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 5	0 1	0 1	0 0	0 0	4	0 0	0 0	4	0 0	0 0	0 0	
	- KASUBID MUTASI KEPEGAWAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 5	0 1	0 1	0 0	0 0	5	0 0	0 0	5	0 0	0 0	0 0	
	- KASUBID PENGADAAN PEGAWAI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 5	0 1	0 1	0 0	0 0	6	0 0	0 0	6	0 0	0 0	0 0	
	- KASUBID KEDUDUKAN HUKUM	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 5	0 1	0 1	0 0	0 0	7	0 0	0 0	7	0 0	0 0	0 0	
	- KASUBID PENGEMBANGAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 5	0 1	0 1	0 0	0 0	8	0 0	0 0	8	0 0	0 0	0 0	
	- KASUBID DIKLAT	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 5	0 1	0 1	0 0	0 0	9	0 0	0 0	9	0 0	0 0	0 0	
	- KASUBID DOKUMENTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 5	0 1	0 1	0 0	0 1	0	0 0	0 1	0	0 0	0 0	0 0	
	- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4	0 5	0 1	0 1	0 0	0 1	1	0 0	0 1	1	0 0	0 0	0 0	
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 1	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	
	- KEPALA BADAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 1	0 0	0 0	1	0 0	0 0	1	0 0	0 0	0 0	
	- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 1	0 0	0 0	2	0 0	0 0	2	0 0	0 0	0 0	
	- KABID BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 1	0 0	0 0	3	0 0	0 0	3	0 0	0 0	0 0	
	- KABID KEWASPADAAN NASIONAL	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 1	0 0	0 0	4	0 0	0 0	4	0 0	0 0	0 0	
- KABID KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, PEMASYARAKATAN DAN EKONOMI		1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 1	0 0	0 0	5	0 0	0 0	5	0 0	0 0	0 0	



NO SKPD/PENGUNA/KUASA PENGUNA DAN SUB KUASA PENGUNA		KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG	KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL	KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN	KODE PENGGUNA BARANG		KODE KUASA PENGGUNA BARANG		KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG	TAHUN PENGADAAN		
	- KABID POLITIK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 0	0 6	0 0	0 0	
	- KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 0	0 7	0 0	0 0	
	- KASUBAG TATA USAHA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 0	0 8	0 0	0 0	
	- KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 0	0 9	0 0	0 0	
	- KASUBID BINA IDEOLOGI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0	
	- KASUBID WAWASAAN KEBANGSAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0	
	- KASUBID KEWASPADAAN DINI, PENGAWASAN ORANG DAN LEMBAGA ASING	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0	
	- KASUBID PENANGANAN KONFLIK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0	
	- KASUBID KETAHANAN SENI DAN BUDAYA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0	
	- KASUBID KETAHANAN AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0	
	- KASUBID KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DAN FASILITAS PEMILU	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0	
	- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 5	0 1	0 0	0 0	0 3	0 0	0 0
	14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 7	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KEPALA BADAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 7	0 1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0
- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 7	0 1	0 0	0 0	0 2	0 0	0 0	
- KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 7	0 1	0 0	0 0	0 3	0 0	0 0	
- KABID PENANGGULANGAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 7	0 1	0 0	0 0	0 4	0 0	0 0	
- KABID REHABILITASI DAN REKOSTRUKSI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 7	0 1	0 0	0 0	0 5	0 0	0 0	
- KASUBAG PERENCANAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 7	0 1	0 0	0 0	0 6	0 0	0 0	
- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 7	0 1	0 0	0 0	0 7	0 0	0 0	
- KASUBAG KEUANGAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 7	0 1	0 0	0 0	0 8	0 0	0 0	
- KASUBID PENCEGAHAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 7	0 1	0 0	0 0	0 9	0 0	0 0	
- KASUBID KESIAPSIAGAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 7	0 1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	
- KASUBID PENYELAMATAN DAN PENANGANAN PENGUNSI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 7	0 1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	
- KASUBID SARANA DAN PRASARANA DARURAT DAN LOGISTIK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 7	0 1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	
- KASUBID REHABILITASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 7	0 1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	
- KASUBID REKONSTRUKSI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 7	0 1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	
- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 7	0 1	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	
15	DINAS PENDIDIKAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 1	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	
- KADIS PENDIDIKAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1	0 1	0 1	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	



NO SKPD/PENGUNA/KUASA PENGUNA DAN SUB KUASA PENGUNA		KODE STATUS KEPEMILIKAI BARANG		KODE INTRAKONTABEL DAI EKSTRAKONTABEL		KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN		KODE PENGGUNA BARANG		KODE KUASA PENGUNA BARANG		KODE SUB KUASA PENGUNA BARANG		TAHUN PENGADAAN	
- SEKRETARIS	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0
- SDN 1 BANGKUDU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	3	0	0	0
- SDN 1 LEMO	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	4	0	0	0
- SDN 1 LIPU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	5	0	0	0
- SDN 1 MALALANDA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	6	0	0	0
- SDN 1 LAANGKE	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	7	0	0	0
- SDN 1 EELAHAI	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	8	0	0	0
- SDN 1 SARAEA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	9	0	0	0
- SDN 1 TOMOAH	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	10	0	0	0
- SDN 1 WANDAKA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	11	0	0	0
- SDN 2 BANGKUDU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	12	0	0	0
- SDN 1 LINSOWU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	13	0	0	0
- SDN 1 KALINU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	14	0	0	0
- SDN 2 LIPU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	15	0	0	0
- SDN 1 BONELIPU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	16	0	0	0
- SDN 1 LAKONEA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	17	0	0	0
- SDN 1 JAMPAKA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	18	0	0	0
- SDN 1 TRIWACU-WACU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	19	0	0	0
- SDN 1 BANU-BANUA JAYA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	20	0	0	0
- SDN 1 WAKUREMPA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	21	0	0	0
- SDN 1 WACULAEA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	22	0	0	0
- SMPN 1 KULISUSU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	23	0	0	0
- SMPN 2 KULISUSU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	24	0	0	0
- SMPN 3 KULISUSU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	25	0	0	0
- SMPN 4 KULISUSU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	26	0	0	0
- SMPN 5 KULISUSU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	27	0	0	0
- SMPN 6 KULISUSU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	28	0	0	0
- SMPN SATAP 1 KULISUSU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	29	0	0	0
- SMPN SATAP 2 KULISUSU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	30	0	0	0
- SMPN SATAP 3 KULISUSU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	31	0	0	0



NO SKPD/PENGUNA/KUASA PENGUNA DAN SUB KUASA PENGUNA

		KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG	KODE INTRAKONTABEL DAI EKSTRAKONTABEL	KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN	KODE PENGGUNA BARANG				KODE KUASA PENGUNA BARANG				KODE SUB KUASA PENGUNA BARANG				TAHUN PENGADAAN			
- SMPN SATAP 4 KULISUSU	1	2	0	1	2	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0
- TK NEGERI LEMO	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	3	0	0
- TK NEGERI PERTIWI	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	4	0	0
- TK NEGERI TANDAI BALE	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	5	0	0
- TK NEGERI PERTIWI EREKE	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	6	0	0
- SDN 1 KOTAWO	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	7	0	0
- SDN 1 LAPANDEWA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	8	0	0
- SDN 1 LABULANDA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	9	0	0
- SDN 1 MARGA KARVA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0
- SDN DAMPALA JAYA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	1	0	0
- SDN 1 KARVA MULLA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	2	0	0
- SDN SOLOI AGUNG	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	3	0	0
- SDN BUMU LAPERO	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	4	0	0
- SDN 1 RAHMAD BARU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	5	0	0
- SMPN 1 KULISUSU BARAT	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	6	0	0
- SMPN 2 KULISUSU BARAT	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	7	0	0
- SMPN 3 KULISUSU BARAT	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	8	0	0
- SMPN 4 KULISUSU BARAT	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	9	0	0
- TK BARU KULISUSU BARAT	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	0	0	0
- SDN 1 BIRA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	1	0	0
- SDN 1 WAMBOULE	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	2	0	0
- SDN 1 LANOSANGIA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	3	0	0
- SDN 1 WAODE BURI	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	4	0	0
- SDN 1 EERINERE	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	5	0	0
- SDN 1 PEBACA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	6	0	0
- SDN 1 LELAMO	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	7	0	0
- SDN 1 LAMOAH	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	8	0	0
- SDN 1 TOROMBIA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	9	0	0
- SDN 1 PETEJA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	6	0	0	0
- SMPN 1 KULISUSU UTARA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	6	1	0	0



NO SKPD/ PENGGUNA/ KUASA PENGGUNA DAN SUB KUASA PENGGUNA		KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG		KODE INTRAKONTABEL DAI EKSTRAKONTABEL		KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN		KODE PENGGUNA BARANG		KODE KUASA PENGGUNA BARANG		KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG		TAHUN PENGADAAN	
- SMPN 2 KULISUSU UTARA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SMPN 3 KULISUSU UTARA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SMPN 4 KULISUSU UTARA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- TK NEGERI 1 WAODE BURI	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 BUBU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 LAGUNDI	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 PONGKOWULU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 MATTA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 KAMBOWA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 MORINDINO	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 KONDE	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 LAHUMOKO	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 BALUARA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 BUBU BARAT	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SMPN 1 KAMBOWA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SMPN 2 KAMBOWA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SMPN 3 KAMBOWA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SMPN SATAP 1 KAMBOWA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SMPN SATAP 2 KAMBOWA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- TK NEGERI MOLOKU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 BONEGUNU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 TANAH MERAH	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 RONTA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 WAODE KALOWO	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 2 BONEGUNUU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 LANGERE	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 LANO IPI	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 BURANGA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 GUNUNG SAHARI	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0
- SDN 1 WAODE ANGKALO	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0



NO SKPD/PENGUNA/KUASA PENGUNA DAN SUB KUASA PENGUNA		KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG	KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL	KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN	KODE PENGUNA BARANG				KODE KUASA PENGUNA BARANG				KODE SUB KUASA PENGUNA BARANG	TAHUN PENGADAAN							
-SDN 1 KOBORUNO	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	9	2	0	0	0
-SDN 1 TATOMBULI	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	9	3	0	0	0
-SMPN 1 BONEGUNU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	9	4	0	0	0
-SMPN 2 BONEGUNU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	9	5	0	0	0
-SMPN 3 BONEGUNU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	9	6	0	0	0
-SMPN SATAP 1 BONEGUNU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	9	7	0	0	0
-SMPN SATAP 2 BONEGUNU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	9	8	0	0	0
-SMPN SATAP BONEGUNU	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	9	9	0	0	0
-TK NEGERI KASULATOMBI	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
-TK NEGERI HARAPAN	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
-SDN 1 LABUAN	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0
-SDN 2 LABUAN	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0
-SDN 1 LASIWA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0
-SDN 1 WANTULASI	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	5	0	0
-SDN 1 LAEA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	6	0	0
-SDN 1 MATALAGI	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	7	0	0
-SDN 1 OENGKAPALA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	8	0	0
-SDN 1 LABUAN WOLIO	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	9	0	0
-SDN 1 LABUAN BAO	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
-SDN 1 LABARAGA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
-SDN 1 LABAJAYA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0
-SDN 1 SUMAMPENO	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	3	0	0
-SMPN 1 WAKORUMBA UTARA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	4	0	0
-SMPN 2 WAKOORUMBA UTARA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	5	0	0
-SMPN SATAP 1 WAKORUMBA UTARA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	6	0	0
-TK NEGERI LABUAN TOBELO	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	7	0	0
-TK NEGERI LABUAN BELANDA	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	8	0	0
-TK NEGERI LANGKORONI	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	9	0	0
-DST	1	2	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0
16 DINAS KESEHATAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0



NO SKPD/PENGUNA/KUASA PENGUNA DAN SUB KUASA PENGUNA	KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG	KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL	KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN	KODE PENGGUNA BARANG	KODE KUASA PENGUNA BARANG	KODE SUB KUASA PENGUNA BARANG	TAHUN PENGADAAN
- KADIS KESEHATAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 2 0 1	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0
- RSUD	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 2 0 1	0 0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0
- RSUD DINKES KULISUSU	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 2 0 1	0 0 0 0 0 3	0 0 0 0 3	0 0 0 0
- RSUD DINKES WA ODE BURI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 2 0 1	0 0 0 0 0 4	0 0 0 0 4	0 0 0 0
- RSUD DINKES LAMBALE	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 2 0 1	0 0 0 0 0 5	0 0 0 0 5	0 0 0 0
- RSUD DINKES BURANGA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 2 0 1	0 0 0 0 0 6	0 0 0 0 6	0 0 0 0
- RSUD DINKES KAMBOWA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 2 0 1	0 0 0 0 0 7	0 0 0 0 7	0 0 0 0
- RSUD DINKES WAKORUMBA UTARA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 2 0 1	0 0 0 0 0 8	0 0 0 0 8	0 0 0 0
- RSUD DINKES LABARAGA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 2 0 1	0 0 0 0 0 9	0 0 0 0 9	0 0 0 0
- RSUD DINKES KIKOKO	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 2 0 1	0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 1 0	0 0 0 0
- RSUD DINKES LAKANSAL	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 2 0 1	0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 1 1	0 0 0 0
- RSUD DINKES BONEROMBO	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 2 0 1	0 0 0 0 1 2	0 0 0 0 1 2	0 0 0 0
- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 2 0 1	0 0 0 0 1 3	0 0 0 0 1 3	0 0 0 0
17 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0
- KADIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0
- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0
- KABID SUMBER DAYA AIR.	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 2	0 0 0 0 0 2	0 0 0 0
- KABID BINA MARGA.	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 3	0 0 0 0 0 3	0 0 0 0
- KABID CIPTA KARYA JASA DAN KONSTRUSI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 4	0 0 0 0 0 4	0 0 0 0
- KABID TATA RUANG.	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 5	0 0 0 0 0 5	0 0 0 0
- KASUBAG PROGRAM, KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 6	0 0 0 0 0 6	0 0 0 0
- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 7	0 0 0 0 0 7	0 0 0 0
- KASI PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA AIR	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 8	0 0 0 0 0 8	0 0 0 0
- KASI PELAKSANAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 9	0 0 0 0 0 9	0 0 0 0
- KASI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 0
- KASI PERENCANAAN DAN EVALUASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 0 1 1	0 0 0 0
- KASI PEMBANGUNAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 1 2	0 0 0 0 0 1 2	0 0 0 0
- KASI PRESERVASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 1 3	0 0 0 0 0 1 3	0 0 0 0
- KASI PENGEMBANGAN SPAM DAN PLP	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 1 4	0 0 0 0 0 1 4	0 0 0 0
- KASI PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 3 0 1	0 0 0 0 0 1 5	0 0 0 0 0 1 5	0 0 0 0



NO	SKPD/PENGGUNA/KUASA PENGGUNA DAN SUB KUASA PENGGUNA	KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG		KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL		KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN		KODE PENGGUNA BARANG				KODE KUASA PENGGUNA BARANG				KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG				TAHUN PENGADAAN								
	- KASI PEMANFAATAN RUANG	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	7	0	0	0	1	7	0	0	0	0
	- KASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	8	0	0	0	1	8	0	0	0	0
	- DST	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	9	0	0	0	1	9	0	0	0	0
18	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- KADIS	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	- SEKRETARIS	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	- KABID PERUMAHAN	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	- KABID PEMUKIMAN	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	- KASUBAG PROGRAM,KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
	- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAAWAIAN	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0
	- KASI PENDTAAN DAN PERENCANAAN PERUMAHAN	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0
	- KASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0
	- KASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERUMAHAN	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0
	- KASI PENDATAAN DAN PEERENCANAAN KAWASAN PEMUKIMAN	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	- KASI PENINGKATAN KUALITAS DAN PEENYEDIAAN PRASARANA DAN FASILITAS UMUM KAWASAN PEMUKIMAN	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	- KASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PRASARANA UTILITAS UMUM KAWASAN PEMUKIMAN	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	- DST	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	1	3	0	0	0	0
19	DINAS SOSIAL	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- KADIS	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	- SEKRETARIS	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	- KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	- KABID PELAYANAN, REHABILITASI SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	- KASUBAG PROGRAM,KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
	- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0
	- KASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KORBAN BENCANA	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0
	- KASI SUMBERDAYA SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0
	- KASI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	6	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0
	- KASI REHABILITA SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	1	2		0	1	1	1	1	2	0	1	0	6	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0



NO	SKPD/PENGGUNA/KUASA PENGGUNA DAN SUB KUASA PENGGUNA	KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG		KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL		KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN		KODE PENGGUNA BARANG							KODE KUASA PENGGUNA BARANG					KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG					TAHUN PENGADAAN			
		1	2	0	1				1	1	2	0	1	0		6	1	1	0		0	0	1	1		0	0	0	1
	- KASI REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	1	2	0	1	1	1	2	0	1	0	6	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
	- KASI PEMBERDAYAAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	1	2	0	1	1	1	2	0	1	0	8	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	
	- DST	1	2	0	1	1	1	2	0	1	0	6	1	1	0	0	0	1	3	0	0	0	1	3	0	0	0	0	
20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- KADIS	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	- SEKRETARIS	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
	- KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
	- KABID PENGURUSTAMAAN JENDER	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
	- KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
	- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
	- KASI PENGUTAMAAN JENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG SOSIAL POLITIK DAN HUKUM	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	
	- KASI PENGUTAMAAN JENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG KUALITAS KELUARGA	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	
	- KASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	
	- KASI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	- KASI PEMENUHAN HAK ANAK	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
	- DTS	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	
21	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- KADIS	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	- SEKRETARIS	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
	- KABID KETERSEDIAAN KERAWANAN PANGAN	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
	- KABID RITRIBUSI PANGAN.	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
	- KABID KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
	- KA SUB. BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
	- KA SUB.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	
	- KASI KETERSEDIAAN PANGAN	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	
	- KASI SUMBER DAYA PANGAN	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	
	- KASI KERAWANAN PANGAN	1	2	0	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	



NO	SKPD/PENGGUNA/KUASA PENGGUNA DAN SUB KUASA PENGGUNA	KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG		KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL		KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN		KODE PENGGUNA BARANG					KODE KUASA PENGGUNA BARANG					KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG					TAHUN PENGADAAN				
		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	- KASI RETRIBUSI PANGAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	- KASI HARGA PANGAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	- KASI CADANGAN PANGAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	1	3	0	0	0	0
	- KASI KONSUMSI PANGAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	1	4	0	0	0	1	4	0	0	0	0
	- KASI PENGANEKARANGAMAN PANGAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	1	5	0	0	0	1	5	0	0	0	0
	- KASI KEAMANAN PANGAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	1	6	0	0	0	1	6	0	0	0	0
	- DST	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	1	7	0	0	0	1	7	0	0	0	0
22	DINAS PERTANAHAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- KADIS	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	- SEKRETARIS	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	- KABID PERIZINAN DAN PENETAPAN PERTANAHAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	- KABID PENANGANAN SENGKETA TANAH,INVENTARISASI DAN PERENCANAAN PERTANAHAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	- KASUBAG PROGRAM, KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
	- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0
	- KASI PERIZINAN PERTANAHAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0
	- KASI PENETAPAN PERTANAAHAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0
	- KASI PENANGANAN SENGKEETA PERTANAHAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0
	- KASI INVENTARISASI, PENGATURAN, PENATAAN,PENGENDALIAN,PEMANFAATAN DAN PERENCANAAN PERTANAHAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	- DST.	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- KADIS	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	- SEKRETARIS	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	- KABID TATA LINGKUNGAN PENATAAN LINGKUNGAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	- KABID PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
	- KASUBAG PERENCANAAN KEUANGAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0
	- KASI KEBIJAKAN WIAYAH DAN SEKTORAL	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0
	- KASI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0



NO	SKPD/PENGGUNA/KUASA PENGGUNA DAN SUB KUASA PENGGUNA	KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG	KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL	KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN	KODE PENGUNA BARANG	KODE KUASA PENGGUNA BARANG	KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG	TAHUN PENGADAAN
	- KASI PENATAAN LINGKUNGAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 5 0 1	0 0 0 0 9	0 0 0 0 9	0 0 0 0
	- KASI PENGENDALIAN PERENCANAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 5 0 1	0 0 0 1 0	0 0 0 1 0	0 0 0 0
	- KASI PENGENDALIAN KERUSAKAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 5 0 1	0 0 0 1 1	0 0 0 1 1	0 0 0 0
	- KASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LB3	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 5 0 1	0 0 0 1 2	0 0 0 1 2	0 0 0 0
	- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 5 0 1	0 0 0 1 3	0 0 0 1 3	0 0 0 0
24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 0 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
	- KADIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0
	- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 0 1	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0
	- KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 0 1	0 0 0 0 3	0 0 0 0 3	0 0 0 0
	- KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 0 1	0 0 0 0 4	0 0 0 0 4	0 0 0 0
	- KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADM KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 0 1	0 0 0 0 5	0 0 0 0 5	0 0 0 0
	- KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 0 1	0 0 0 0 6	0 0 0 0 6	0 0 0 0
	- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 0 1	0 0 0 0 7	0 0 0 0 7	0 0 0 0
	- KASI IDENTITAS PENDUDUK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 0 1	0 0 0 0 8	0 0 0 0 8	0 0 0 0
	- KASI PINDAH DATANG PENDUDUK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 0 1	0 0 0 0 9	0 0 0 0 9	0 0 0 0
	- KASI PENDATAAN PENDUDUK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 0 1	0 0 0 1 0	0 0 0 1 0	0 0 0 0
	- KASI KELAHIRAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 0 1	0 0 0 1 1	0 0 0 1 1	0 0 0 0
	- KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 0 1	0 0 0 1 2	0 0 0 1 2	0 0 0 0
	- KASI PERUBAHAN STATUS ANAK PEWARNEGARAAN DAN KEMATIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 0 1	0 0 0 1 3	0 0 0 1 3	0 0 0 0
	- KASI SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 1 1	0 0 0 1 4	0 0 0 1 4	0 0 0 0
	- KASI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 0 1	0 0 0 1 5	0 0 0 1 5	0 0 0 0
	- KASI KERJASAMA DAN INOVAASI PELAYANAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 6 0 1	0 0 0 1 6	0 0 0 1 6	0 0 0 0
	- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 1 7	0 0 0 1 7	0 0 0 0
25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
	- KADIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0
	- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0
	- KABID PEMERINTAHAN DESA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 3	0 0 0 0 3	0 0 0 0
	- KABID PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 4	0 0 0 0 4	0 0 0 0
	- KABID PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA,USAHA EKONOMI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 5	0 0 0 0 5	0 0 0 0



NO SKPD/PENGUNA/KUASA PENGUNA DAN SUB KUASA PENGUNA		KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG	KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL	KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN	KODE PENGGUNA BARANG	KODE KUASA PENGGUNA BARANG	KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG	TAHUN PENGADAAN
26	- KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 0 6	0 0 0 0 0 6	0 0 0 0
	- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 0 7	0 0 0 0 0 7	0 0 0 0
	- KASI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN USAHA GOTONG ROYONG	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 0 8	0 0 0 0 0 8	0 0 0 0
	- KASI PEMBINAAN PRASARANA PENGEMBANGAN DESA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 0 9	0 0 0 0 0 9	0 0 0 0
	- KASI PENGOLAHAN DATA DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 1 0	0 0 0 0
	- KASI PELATIHAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN PARTISIPASI MASYARAKAT	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 1 1	0 0 0 0
	- KASI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 1 2	0 0 0 0 1 2	0 0 0 0
	- KASI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 1 3	0 0 0 0 1 3	0 0 0 0
	- KASI PEMBERDAYAAN EKONOMI PENDUDUK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 1 4	0 0 0 0 1 4	0 0 0 0
	- KASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 1 5	0 0 0 0 1 5	0 0 0 0
	- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 7 0 1	0 0 0 0 1 6	0 0 0 0 1 6	0 0 0 0
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 8 0 1	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0
	- KADIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 8 0 1	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0
	- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 8 0 1	0 0 0 0 0 2	0 0 0 0 0 2	0 0 0 0
	- KABID PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN PENGGERAKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 8 0 1	0 0 0 0 0 3	0 0 0 0 0 3	0 0 0 0
	- KABID KB, KETAHANAN, DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 8 0 1	0 0 0 0 0 4	0 0 0 0 0 4	0 0 0 0
27	- SUB BAGIAN PERENCANAAN.	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 8 0 1	0 0 0 0 0 5	0 0 0 0 0 5	0 0 0 0
	- SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 8 0 1	0 0 0 0 0 6	0 0 0 0 0 6	0 0 0 0
	- KA SEKSI ADVOKASI DAN PENGGERAKAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 8 0 1	0 0 0 0 0 7	0 0 0 0 0 7	0 0 0 0
	- KA SEKSI PENYULUHAN DAN PENDAYAGUNAAN PKB/PLKB DAN KADER KB	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 8 0 1	0 0 0 0 0 8	0 0 0 0 0 8	0 0 0 0
	- KA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK.	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 8 0 1	0 0 0 0 0 9	0 0 0 0 0 9	0 0 0 0
	- KA SEKSI JAMINAN BER KB.	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 8 1 1	0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 1 0	0 0 0 0
	- KA SEKSI PEMBINAAN KESERTAAN BER KB.	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 8 1 1	0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 1 1	0 0 0 0
	- KA SEKSI KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 8 1 1	0 0 0 0 1 2	0 0 0 0 1 2	0 0 0 0
	- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 8 1 1	0 0 0 0 1 3	0 0 0 0 1 3	0 0 0 0
	DINAS PERHUBUNGAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 9 0 1	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0
	- KADIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 9 0 1	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0
28	- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 9 0 1	0 0 0 0 0 2	0 0 0 0 0 2	0 0 0 0
	- KABID LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 0 9 0 1	0 0 0 0 0 3	0 0 0 0 0 3	0 0 0 0



NO SKPD/PENGUNA/KUASA PENGUNA DAN SUB KUASA PENGUNA		KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG	KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL	KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN	KODE PENGGUNA BARANG				KODE KUASA PENGGUNA BARANG	KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG				TAHUN PENGADAAN			
28	- KABID PRASARANA DAN KESELAMATAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	0 9	0 1	0 0	0 4	0 0	0 4	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KABID PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	0 9	0 1	0 0	0 5	0 0	0 5	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	0 9	0 1	0 0	0 6	0 0	0 6	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	0 9	0 1	0 0	0 7	0 0	0 7	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KASI LALU LINTAS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	0 9	0 1	0 0	0 8	0 0	0 8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KASI ANGKUTAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	0 9	0 1	0 0	0 9	0 0	0 9	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KASI PRASARANA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	0 9	1 1	0 0	1 1	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KASI KESELAMATAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	0 9	1 1	0 0	1 2	0 0	0 1	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	0 9	1 1	0 0	1 4	0 0	0 1	2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMAS DAN PERSANDIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KADIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	0 2	0 0	0 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	0 3	0 0	0 3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KABID TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	0 4	0 0	0 4	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KABID PERSANDIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	0 5	0 0	0 5	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KASUBAG ROGRAM KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	0 6	0 0	0 6	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	0 7	0 0	0 7	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KASI MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	0 8	0 0	0 8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN SUMBERDAYA KOMUNIKASI PUBLIK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	0 9	0 0	0 9	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KASI LAYANAN INFORMASI DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KASI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	1 1	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KASI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN TIK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	1 2	0 0	1 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KASI TATA KELOLA PERSANDIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	1 3	0 0	1 3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KASI OPERASIONAL PENGAMANAN PERSANDIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	1 4	0 0	1 4	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KASI PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	1 5	0 0	1 5	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 0	0 1	0 0	1 6	0 0	1 6	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 1	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KADIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 1	1 0	1 0	0 1	0 0	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 1	1 0	1 0	0 2	0 0	0 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	- KABID KOPERASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2	1 1	1 0	1 0	0 3	0 0	0 3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



NO SKPD/PENGUNA/KUASA PENGUNA DAN SUB KUASA PENGUNA		KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG	KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL	KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN	KODE PENGGUNA BARANG						KODE KUASA PENGGUNA BARANG			KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG			TAHUN PENGADAAN						
		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	
- KABID USAHA KECIL DAN MENENGAH		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KABID TENAGA KERJA		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	5	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	6	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	7	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASI KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA KOPERASI		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	8	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASI PELAYANAN DATA,INFORMASI DAN JARINGAN USAHA KOPERASI		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	9	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASI FASILITASI PEMBIAYAAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0 <td>1</td> <td>0</td>	1	0
- KASI PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA KOPERASI		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASI PENGEMBANGAN INFORMASI DATA DAN PUBLIKASI		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASI PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAHAAN DAN PEMASARAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	3	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PLP		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	4	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASI PROGRAM PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	5	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	6	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- DST		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	7	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
30 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KADIS		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- SEKRETARIS		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KABID PENGEMBANGAN DAN PROMOSI		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KABID PENGENDALIAN INFGRMASI PENANAMAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KABID PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	5	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KABID PENGADUAN KEBUAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	6	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASI PERENCANAAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	7	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASI PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	8	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASI PROMOSI PENANAMAN MODAL		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	9	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASI PEMANTAUAN PENGAWASAN PELAKSANAAN MODAL		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0 <td>1</td> <td>0</td>	1	0
- KASI PEMBINAAN PELAKSAAN PM		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASI PENGOLAHAN DATA DAN SISTIM INFORMASI		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASI PELAYANAN PENDAFTARAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	3	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASI PERIZINAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	4	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0
- KASI NON PERIZINAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	5	0	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0



NO	SKPD/PENGGUNA/KUASA PENGGUNA DAN SUB KUASA PENGGUNA	KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG	KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL	KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN	KODE PENGGUNA BARANG	KODE KUASA PENGGUNA BARANG	KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG	TAHUN PENGADAAN
	- KASI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN PERIZINAN/NON PERIZINAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 2 1 0 1	0 0 0 1 6	0 0 0 1 6	0 0 0 0
	- KASI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 2 1 0 1	0 0 0 1 7	0 0 0 1 7	0 0 0 0
	- KASI PELAPORAN PENINGKATAN LAYANAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 2 1 0 1	0 0 0 1 9	0 0 0 1 9	0 0 0 0
	- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 2 1 0 1	0 0 0 2 0	0 0 0 2 0	0 0 0 0
31	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
	- KADIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0
	- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0
	- KABID LAYANAN KEPEMUDAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 0 3	0 0 0 0 3	
	- KABID PEMBUDAYAAN OLAH RAGA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 0 4	0 0 0 0 4	0 0 0 0
	- KABID PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 0 5	0 0 0 0 5	0 0 0 0
	- KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 0 6	0 0 0 0 6	0 0 0 0
	- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 0 7	0 0 0 0 7	0 0 0 0
	- KASI PEMBERDAYAAN PEMUDA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 0 8	0 0 0 0 8	0 0 0 0
	- KASI PENGEMBANGAN PEMUDA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 0 9	0 0 0 0 9	0 0 0 0
	- KASI INFRASTRUKTUR DAN KEMITRAAN PEMUDA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 1 0	0 0 0 1 0	0 0 0 0
	- KASI OLAH RAGA PENDIDIKAN DAN SENTRA OLAH RAGA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 1 1	0 0 0 1 1	0 0 0 0
	- KASI OLAH RAGA REKREASI TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 1 2	0 0 0 1 2	0 0 0 0
	- KASI KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN OLAH RAGA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 1 3	0 0 0 1 3	0 0 0 0
	- KASI PEMBIBITAN IPTEK DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 1 4	0 0 0 1 4	0 0 0 0
	- KASI ROMOSI OLAHRAGA DAN PRESTASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 1 5	0 0 0 1 5	0 0 0 0
	- KASI STANDARISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAH RAGA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 1 6	0 0 0 1 6	0 0 0 0
	- DST.	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 3 0 1	0 0 0 1 7	0 0 0 1 7	0 0 0 0
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 7 0 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
	- KADIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 7 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0
	- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 7 0 1	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0
	- KABID PERPUSTAKAAN ,DEPOSIT,PELAYANAN DAN PEMBINAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 7 0 1	0 0 0 0 3	0 0 0 0 3	0 0 0 0
	- KABID PENGELOLAAN LAYANAN,PELESTARIAN DAN PEMBINAAN KEARSIPAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 7 0 1	0 0 0 0 4	0 0 0 0 4	0 0 0 0
	- KASUBAG PERENCANAAN,KEUANGAN EVALUASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 7 0 1	0 0 0 0 5	0 0 0 0 5	0 0 0 0
	- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 7 0 1	0 0 0 0 6	0 0 0 0 6	0 0 0 0
	- KASI DEPOSIT, PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 7 0 1	0 0 0 0 7	0 0 0 0 7	0 0 0 0



NO SKPD / PENGGUNA / KUASA PENGGUNA DAN SUB KUASA PENGGUNA	KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG	KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL	KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN	KODE PENGGUNA BARANG	KODE KUASA PENGGUNA BARANG	KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG	TAHUN PENGADAAN
- KASI LAYANAN PUSTAKA DAN INFORMASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 7 0 1	0 0 0 0 8	0 0 0 0 8	0 0 0 0
- KASI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 7 0 1	0 0 0 0 9	0 0 0 0 9	0 0 0 0
- KASI PENGOLAHAN ARSIP	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 7 0 1	0 0 0 1 0	0 0 0 1 0	0 0 0 0
- KASI LAYANAN KEARSIPAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 7 0 1	0 0 0 1 1	0 0 0 1 1	0 0 0 0
- KASI PEMBINAAN DAN PENGOLAHAN KEARSIPAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 7 0 1	0 0 0 1 2	0 0 0 1 2	0 0 0 0
- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 2 1 7 0 1	0 0 0 1 3	0 0 0 1 3	0 0 0 0
33 DINAS PERIKANAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
- KADIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0
- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0
- KABID PERIKANAN TANGKAP	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 0 3	0 0 0 0 3	0 0 0 0
- KABID PERIKANAN BUDIDAYA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 0 4	0 0 0 0 4	0 0 0 0
- KABID PENGAWASAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 0 5	0 0 0 0 5	0 0 0 0
- KASUBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ANALISIS TEKNIK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 0 6	0 0 0 0 6	0 0 0 0
- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 0 7	0 0 0 0 7	0 0 0 0
- KASI SARANA DAN PRASARANA TANGKAP PENGELOLA SUMBER DAYA IKAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 0 7	0 0 0 0 8	0 0 0 0
- KASI PENILAIAN DAN PENGENDALIAN PENANGKAPAN IKAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 0 8	0 0 0 0 9	0 0 0 0
- KASI PRODUKSI DAN USAHA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 0 9	0 0 0 1 0	0 0 0 0
- KASI PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 1 0	0 0 0 1 1	0 0 0 0
- KASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 1 1	0 0 0 1 2	0 0 0 0
- KASI BINA MUTU DAN PRODUK PERIKANAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 1 2	0 0 0 1 3	0 0 0 0
- KASI PENGAWASAN DAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 1 3	0 0 0 1 4	0 0 0 0
- KASI PENGELOLAAN RUANG LAUT	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 1 4	0 0 0 1 5	0 0 0 0
- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 1 0 1	0 0 0 1 5	0 0 0 1 6	0 0 0 0
34 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
- KADIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0
- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0
- KABID PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI WISATA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 0 3	0 0 0 0 3	0 0 0 0
- KABID PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 0 4	0 0 0 0 4	0 0 0 0
- KABID PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 0 5	0 0 0 0 5	0 0 0 0
- KABID KEBUDAYAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 0 6	0 0 0 0 6	0 0 0 0



NO SKPD/PENGGUNA/KUASA PENGGUNA DAN SUB KUASA PENGGUNA	KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG	KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL	KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN	KODE PENGGUNA BARANG	KODE KUASA PENGGUNA BARANG	KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG	TAHUN PENGADAAN
- KASUBAG PERENCANAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 0 7	0 0 0 0 7	0 0 0 0
- KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 0 8	0 0 0 0 8	0 0 0 0
- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 0 9	0 0 0 0 9	0 0 0 0
- KASI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA BUDAYA DAN BUATAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 1 0	0 0 0 1 0	0 0 0 0
- KASI TATA KELOLA DESTINASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 1 1	0 0 0 1 1	0 0 0 0
- KASI PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 1 2	0 0 0 1 2	0 0 0 0
- KASI ANALISA STRATEGI PERMODALAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 1 3	0 0 0 1 3	0 0 0 0
- KASI PROMOSI PARIWISATA DAN SARANA PRASARANA PROMOSI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 1 4	0 0 0 1 4	0 0 0 0
- KASI FASILITAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL REGULASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 1 5	0 0 0 1 5	0 0 0 0
- KASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPARIWISATAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 1 6	0 0 0 1 6	0 0 0 0
- KASI HUBUNGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 1 7	0 0 0 1 7	0 0 0 0
- KASI ANALISIS KEBIJAKAN KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 1 8	0 0 0 1 8	0 0 0 0
- KASI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 1 9	0 0 0 1 9	0 0 0 0
- KASI SEJARAH DAN TRADISI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 2 0	0 0 0 2 0	0 0 0 0
- KASI KESENIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 2 1	0 0 0 2 1	0 0 0 0
- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 2 0 1	0 0 0 2 2	0 0 0 2 2	0 0 0 0
35 DINAS PERTANIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 3 0 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
- KADIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 3 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0
- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 3 0 1	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0
- KABID TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 3 0 1	0 0 0 0 3	0 0 0 0 3	0 0 0 0
- KABID PETERNAKAN DAN KESHATAN HEWAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 3 0 1	0 0 0 0 4	0 0 0 0 4	0 0 0 0
- KABID PRASARANA, SARA DAN PENYULUHAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 3 0 1	0 0 0 0 5	0 0 0 0 5	0 0 0 0
- KABID PERKEBUNAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 3 0 1	0 0 0 0 6	0 0 0 0 6	0 0 0 0
- KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 3 0 1	0 0 0 0 7	0 0 0 0 7	0 0 0 0
- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 3 0 1	0 0 0 0 8	0 0 0 0 8	0 0 0 0
- KASI PEMBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 3 0 1	0 0 0 0 9	0 0 0 0 9	0 0 0 0
- KASI PRODUKSI TANAMAN PANGAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 3 0 1	0 0 0 1 0	0 0 0 1 0	0 0 0 0
- KASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN TANAMAN PANGAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 3 0 1	0 0 0 1 1	0 0 0 1 1	0 0 0 0
- KASI PEMBANGUNAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 3 0 1	0 0 0 1 2	0 0 0 1 2	0 0 0 0
- KASI PRODUKSI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 3 0 1	0 0 0 1 3	0 0 0 1 3	0 0 0 0



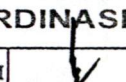

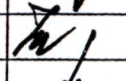
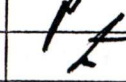
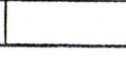
NO SKPD/PENGGUNA/KUASA PENGUNA DAN SUB KUASA PENGUNA		KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG	KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL	KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN	KODE PENGGUNA BARANG				KODE KUASA PENGGUNA BARANG				KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG				TAHUN PENGADAAN						
		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	3	0	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0
- KASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	3	0	1	0	0	0	1	4	0	0	0	0
- KASI PEMBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	3	0	1	0	0	0	1	5	0	0	0	0
- KASI KESEHATAN HEWAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	3	0	1	0	0	0	1	6	0	0	0	0
- KASI KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	3	0	1	0	0	0	1	7	0	0	0	0
- KASI SARANA DAN PRASARANA		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	3	0	1	0	0	0	1	8	0	0	0	0
- KASI PAKAN DAN INVESTASI		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	3	0	1	0	0	0	1	9	0	0	0	0
- KASI PENYULHAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	3	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
- DST		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	3	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0
36 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- KADIS		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
- SEKRETARIS		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
- KABID INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0
- KABID INDUSTRI AGRO		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0
- KABID PERDAGANGAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0
- KABID PENGELOLAAN PASAR		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0
- KASUBAG PROGRAM		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0
- KASUBAG KEUANGAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0
- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0
- KASI INDUSTRI KERAJINAN DAN BAHAN BANGUNAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
- KASI INDUSTRI LOGAM MESIN, TEKSTIL DAN ANEKA		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
- KASI PRODUKSI DAN PROMOSI HASIL INDUSTRI		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0
- KASI INDUSTRI SANDANG DAN PANGAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0
- KASI INDUSTRI AGRO KIMIA,TRANSPORTASI TELEMATIKA		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	1	5	0	0	0	0
- KASI INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	1	6	0	0	0	0
- KASI PENGEMBAANGAN PERDAGANGAN PROMOSI DAN KERJA SAMA		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	1	7	0	0	0	0
- KASI PENGAWASAN ,BINA USAHA DAGANG DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	1	8	0	0	0	0
- KASI METEOROLOGI		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	1	9	0	0	0	0
- KASI SARANA DAN PRASARANA PASAR		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
- KASI KEBERSIHAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN PASAR		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0
- KASI PENGELOLAAN PENDAPATAN		1	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0	7	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0




NO SKPD/PENGUNA/KUASA PENGUNA DAN SUB KUASA PENGUNA											
	KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG	KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL	KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN	KODE PENGGUNA BARANG			KODE KUASA PENGGUNA BARANG	KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG	TAHUN PENGADAAN	
- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 7 0 1	0 0 0 2 3	0 0 0 2 3	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
37 DINAS TRANSMIGRASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KADIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 1	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 2	0 0 0 2	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KABID PENYIAPAN, PEMUKIMAN TRANSMIGRASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 3	0 0 0 3	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KABID PENATAAN DAN PERSEBARAN PENDUDUK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 6 0 1	0 0 0 4	0 0 0 4	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KABID PEMBINAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 5	0 0 0 5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KABID PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 6	0 0 0 6	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KASUBAG PEENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 7	0 0 0 7	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KASUBAG KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 2 8 0 1	0 0 0 8	0 0 0 8	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 9	0 0 0 9	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KASI IDENTIFIKASI DAN PENYIAPAN AREAL	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 1 0	0 0 0 1 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KASI PEMBANGUNAN PEMUKIIMAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 1 1	0 0 0 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KASI PENGURUSAN HAK PENGELOLAAN DAN STATUS TANAH	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 1 2	0 0 0 1 2	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KASI PENDAFTARAN DAN PENYIAPAN CALON TRANSMIGRASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 1 3	0 0 0 1 3	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KASI PELAYANAN PERPINDAHAN PENDUDUK	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 1 4	0 0 0 1 4	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KASI PEMBINAAN USAHA EKONOMI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 1 5	0 0 0 1 5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KASI PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 1 6	0 0 0 1 6	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KASI PENATAAN KELEMBAGAAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 1 7	0 0 0 1 7	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KASI SARA DAN PRASARANA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 1 8	0 0 0 1 8	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KASI LAYANAN PERTANAHAN DAN PENYERASIAN LINGKUNGAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 1 9	0 0 0 1 9	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KASI PENATAAN LAHAN USAHA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 2 0	0 0 0 2 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 3 0 8 0 1	0 0 0 2 1	0 0 0 2 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
38 INSPEKTORAT	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 2 0 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- INSPEKTUR	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 2 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 2 0 1	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 2 0 1	0 0 0 0 3	0 0 0 0 3	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- INSPEKTUR WILAYAH II	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 2 0 1	0 0 0 0 4	0 0 0 0 4	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KASU BAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 2 0 1	0 0 0 0 5	0 0 0 0 5	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
- KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 2 0 1	0 0 0 0 6	0 0 0 0 6	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	



NO SKPD/PENGGUNA/KUASA PENGGUNA DAN SUB KUASA PENGGUNA	KODE STATUS KEPEMILIKAN BARANG	KODE INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL	KODE PROVINSI	KODE KABUPATEN	KODE PENGGUNA BARANG	KODE KUASA PENGGUNA BARANG	KODE SUB KUASA PENGGUNA BARANG	TAHUN PENGADAAN
- AUDITOR.	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 2 0 1	0 0 0 0 7	0 0 0 0 7	0 0 0 0
- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 4 0 2 0 1	0 0 0 0 8	0 0 0 0 8	0 0 0 0
39 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
- KASAT POL PP	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0 1	0 0 0 0
- SEKRETARIS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0
- KABID PENEGAKAN PERDA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 0 3	0 0 0 0 3	0 0 0 0
- KABID KETERTIBAN UMUM	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 0 4	0 0 0 0 4	0 0 0 0
- KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 0 5	0 0 0 0 5	0 0 0 0
- KASUBAG KEUANGAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 0 6	0 0 0 0 6	0 0 0 0
- KASUBAG PROGRAM	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 0 7	0 0 0 0 7	0 0 0 0
- KASI PENEGAKAN KERJA SAMA	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 0 8	0 0 0 0 8	0 0 0 0
- KASI PEMBINA, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 0 9	0 0 0 0 9	0 0 0 0
- KASI OPERASI DAN PENGENDALIAN	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 1 0	0 0 0 1 0	0 0 0 0
- KASI KETERTIBAN UMUM	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 1 1	0 0 0 1 1	0 0 0 0
- KASI PENINGKATAN KAPASITAS	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 1 2	0 0 0 1 2	0 0 0 0
- KASI PEMADAM DAN EVALUASI	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 1 3	0 0 0 1 3	0 0 0 0
- KASI PERLINDUNGAN MAASYARAKAT	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 1 4	0 0 0 1 4	0 0 0 0
- KASI PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 1 5	0 0 0 1 5	0 0 0 0
- DST	1 2	0 1	1 1	1 2	0 1 0 6 0 1	0 0 0 1 6	0 0 0 1 6	0 0 0 0

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. 	
BAGIAN HUKUM	
BKD	

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN



## LAMPIRAN II

### PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2016

### TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

#### PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

#### A. TATA CARA PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

##### I. PENDAHULUAN

Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan Barang Milik Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, dan optimal.

Hasil penatausahaan Barang Milik Daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang secara langsung akan menjadi bahan dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah.

Pelaporan Barang Milik Daerah disusun menurut neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa barang persediaan. Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan.

Pelaporan Barang Milik Daerah dilakukan melalui pencatatan Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola, pengguna barang dan kuasa pengguna barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

##### II. TUJUAN

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.



## PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah meliputi :

### 1. Kode Barang.

Kode barang terdiri dari 12 (dua belas) angka/digit yang terbagi dalam 7 (tujuh) level dengan susunan sebagai berikut:

[X] . [X] . [X] . [XX] . [XX] . [XX] . [XXX]

Satu angka/level satu	: menunjukkan akun.
Satu angka/level dua	: menunjukkan kelompok.
Satu angka/level tiga	: menunjukkan jenis.
Dua angka/level empat	: menunjukkan objek. Menunjukkan rincian
Dua angka/level lima	: objek.
Dua angka/level enam	: Menunjukkan sub rincian objek.
Tiga angka/level tujuh	: menunjukkan sub-sub rincian objek.

#### a. Level 1 menunjukkan kode akun.

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah pada level 1 menunjukkan kode akun yang terdiri dari aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

#### b. Level 2 menunjukkan kode kelompok.

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah pada level 2 menunjukkan kode kelompok yang terdiri dari (Tabel 2.1):

- 1) aset lancar, yaitu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



- 1) aset tetap, yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; dan
- 2) aset lainnya, yaitu Aset lainnya adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset tetap.

Penulisan pada level dua untuk kelompok, sebagai berikut:

- 1) Kode 1 untuk kelompok aset lancar.
- 2) Kode 2 untuk kelompok aset tetap.
- 3) Kode 3 untuk kelompok aset lainnya.

c. Level 3 menunjukkan kode jenis.

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah pada level 3 menunjukkan kode jenis yang terdiri dari (Tabel 2.2):

- 1) Persediaan.

Kodefikasi Barang Milik Daerah pada aset lancar hanya mencakup barang persediaan. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Tanah.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

- 3) Peralatan dan mesin.

Peralatan dan mesin dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- 4) Gedung dan bangunan.

Gedung dan bangunan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.



5) Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

6) Aset tetap lainnya.

Aset tetap lainnya dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

7) Konstruksi dalam pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggallaporan keuangan belum selesai seluruhnya.

8) Akumulasi Penyusutan.

Akumulasi penyusutan digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah.

9) Aset kemitraan dengan pihak ketiga.

Aset kemitraan dengan pihak ketiga dikelompokkan sebagai aset lainnya yang merupakan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang mencakup : Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

10) Aset tak berwujud.

Aset tak berwujud dikelompokkan sebagai aset lainnya yang merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual

11) Aset lain-lain.

Aset lain-lain dikelompokkan sebagai aset lainnya yang merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.



Penulisan pada level tiga untuk jenis, sebagai berikut:

- 1) Untuk kelompok aset lancar dirinci ke dalam jenis, yaitu: Kode 7 untuk jenis Persediaan.
- 2) Untuk kelompok aset tetap dirinci ke dalam jenis, yaitu:
  - a) Kode 1 untuk jenis tanah
  - b) Kode 2 untuk jenis peralatan dan mesin.
  - c) Kode 3 untuk jenis gedung dan bangunan.
  - d) Kode 4 untuk jenis jalan, jaringan dan irigasi.
  - e) Kode 5 untuk jenis aset tetap lainnya.
  - f) Kode 6 untuk jenis konstruksi dalam pengerjaan
  - g) Kode 7 untuk jenis akumulasi penyusutan.
- 3) Untuk kelompok aset lainnya dirinci ke dalam jenis, yaitu:
  - a) Kode 2 untuk jenis kemitraan dengan pihak ketiga.
  - b) Kode 3 untuk jenis aset tidak berwujud.
  - c) Kode 4 untuk jenis aset lain-lain.
  - d. Level 4 menunjukkan kode objek.

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah pada level menunjukkan kode objek yang terdiri dari (Tabel 2.3):

- 1) Untuk jenis persediaan dirinci ke dalam objek, yaitu:
  - a) Kode 01 untuk objek barang pakai habis.
  - b) Kode 02 untuk objek barang tak pakai habis.
  - c) Kode 03 untuk objek barang bekas dipakai.
- 2) Untuk jenis tanah dirinci ke dalam objek, yaitu : Kode 01 untuk objek tanah.
- 3) Untuk jenis peralatan dan mesin dirinci ke dalam objek, yaitu:
  - a) Kode 01 untuk objek alat besar.
  - b) Kode 02 untuk objek alat angkutan.
  - c) Kode 03 untuk objek alat bengkel dan alat ukur.
  - d) Kode 04 untuk objek alat pertanian.
  - e) Kode 05 untuk objek alat kantor dan rumah tangga.
  - f) Kode 06 untuk objek alat studio komunikasi dan pemancar.
  - g) Kode 07 untuk objek alat kedokteran dan kesehatan.
  - h) Kode 08 untuk objek alat laboratorium.
  - i) Kode 09 untuk objek alat persenjataan.
  - j) Kode 10 untuk objek komputer.
  - k) Kode 11 untuk objek alat eksplorasi.



- k) Kode 12 untuk objek alat pengeboran.
  - l) Kode 13 untuk objek alat produksi, pengelolaan dan pemurnian.
  - m) Kode 14 untuk objek alat bantu eksplorasi.
  - n) Kode 15 untuk objek alat keselamatan kerja.
  - o) Kode 16 untuk objek alat peraga.
  - p) Kode 17 untuk objek peralatan proses/produksi.
  - q) Kode 18 untuk objek rambu-rambu.
  - r) Kode 19 untuk objek peralatan olahraga.
- 4) Untuk jenis gedung dan bangunan dirinci ke dalam objek, yaitu:
- a) Kode 01 untuk objek bangunan gedung.
  - b) Kode 02 untuk objek monumen.
  - c) Kode 03 untuk objek bangunan menara.
  - d) Kode 04 untuk objek tugu titik kontrol/pasti.
  - e) Untuk jenis jalan, jaringan dan irigasi dirinci ke dalam objek, yaitu:
  - f) Kode 01 untuk objek jalan dan jembatan.
  - g) Kode 02 untuk objek bangunan air.
  - h) Kode 03 untuk objek instalasi.
  - i) Kode 04 untuk objek jaringan.
- 5) Untuk jenis aset tetap lainnya dirinci ke dalam objek, yaitu:
- a) Kode 01 untuk objek bahan perpustakaan.
  - b) Kode 02 untuk objek barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga.
  - c) Kode 03 untuk objek hewan.
  - d) Kode 04 untuk objek biota perairan.
  - e) Kode 05 untuk objek tanaman.
  - f) Kode 06 untuk objek barang koleksi non budaya.
  - g) Kode 07 untuk objek aset tetap dalam renovasi.
- 6) Untuk jenis konstruksi dalam pengerjaan dirinci ke dalam objek, yaitu:
- Kode 01 untuk objek konstruksi dalam pengerjaan.
- 7) Untuk jenis akumulasi penyusutan dirinci ke dalam objek, yaitu:
- a) Kode 01 untuk objek akumulasi penyusutan peralatan dan mesin.
  - b) Kode 02 untuk objek akumulasi penyusutan gedung dan bangunan.
  - c) Kode 03 untuk objek akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan.



- c) Kode 04 untuk objek akumulasi penyusutan aset tetap lainnya.
- 8) Untuk jenis kemitraan dengan pihak ketiga dirinci ke dalam objek, yaitu : Kode 01 untuk objek kemitraan pihak ketiga.
- 9) Untuk jenis aset tidak berwujud dirinci ke dalam objek, yaitu : Kode 01 untuk objek aset tak berwujud.
- 10) Untuk jenis aset lain-lain dirinci ke dalam objek, yaitu : Kode 01 untuk objek aset lain-lain.
- 11) Untuk jenis akumulasi amortisasi aset tidak berwujud dirinci ke dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.
- 12) Untuk jenis akumulasi penyusutan aset lainnya dirinci ke dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek akumulasi penyusutan aset lainnya.
- Level 05 menunjukkan kode rincian objek Penggolongan dan kodefikasi rincian objek dapat dilihat pada Tabel 2.4.
  - Level 06 menunjukkan kode sub rincian objek Penggolongan dan kodefikasi sub rincian objek dapat dilihat pada Tabel 2.5.
  - Level 07 menunjukkan kode sub-sub rincian objek Penggolongan dan kodefikasi sub-sub rincian objek dapat dilihat pada Tabel 2.6.

## 2. Kode Lokasi

Kode lokasi terdiri dari 24 (dua puluh empat) angka/digit yang terbagi dalam 7 (tujuh) level dengan susunan sebagai berikut:

XX . XX . XX . XX . XXXXXX . XXXXXX . XXXXXX

- |                       |   |                                                                     |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Dua angka/level satu  | : | menunjukkan kode status kepemilikan barang.                         |
| Dua angka/level dua   | : | menunjukkan kode barang Intrakomptabel atau barang Ekstrakomptabel. |
| Dua angka/level tiga  | : | menunjukkan kode provinsi.                                          |
| Dua angka/level empat | : | menunjukkan kode kabupaten/kota.                                    |
| Enam angka/level lima | : | Menunjukkan kode pengguna barang atau kode pengelola barang.        |



Lima angka/level enam	: menunjukkan kode kuasa pengguna barang.
Lima angka/level tujuh	: menunjukkan kode sub kuasa pengguna barang.

Penjelasan:

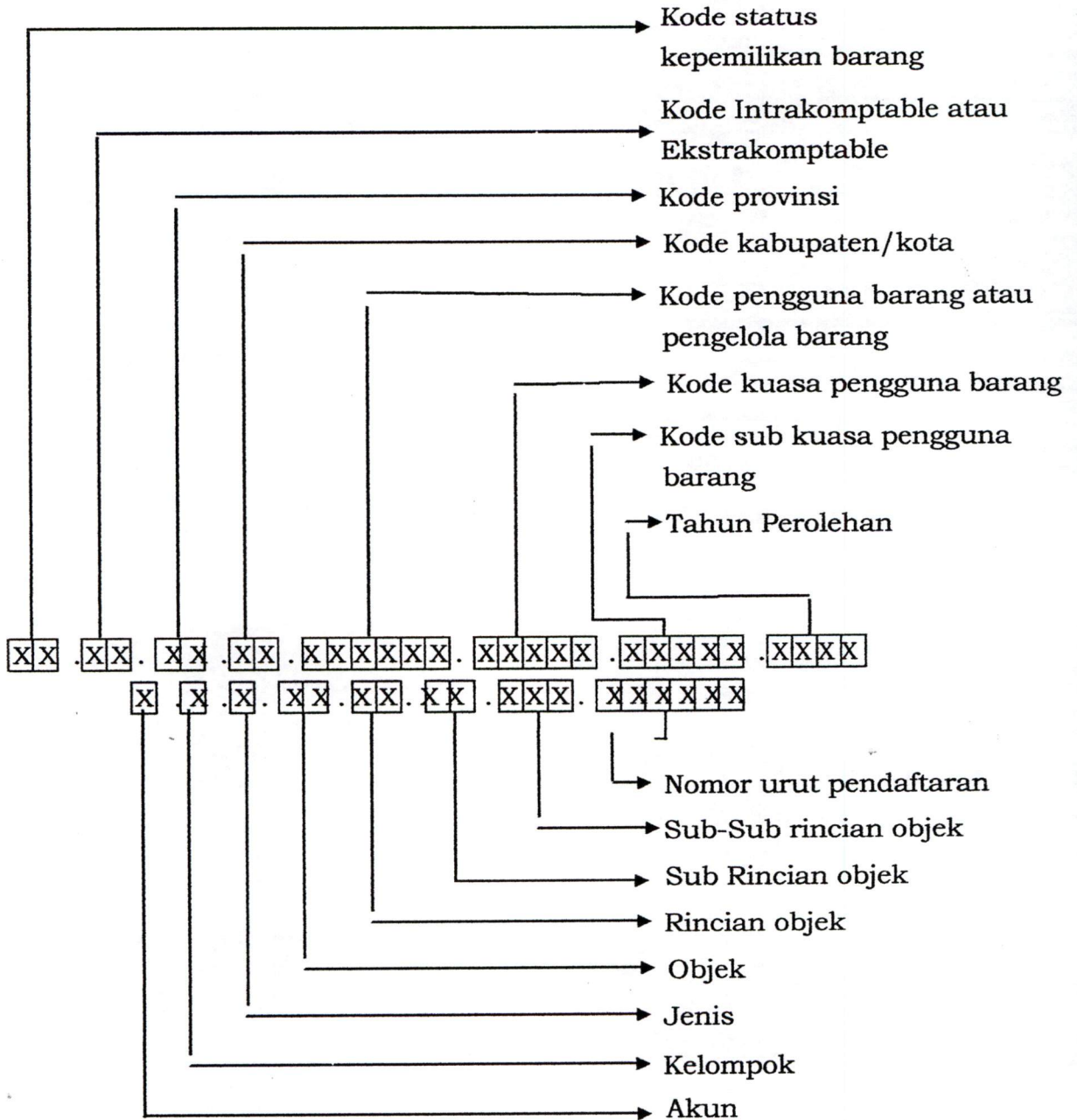
- a. Kode status kepemilikan dan pemberian kode status kepemilikan barang meliputi:
  - 1) barang milik pemerintah pusat (kode 00);
  - 2) barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11);
  - 3) barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota (kode 12);
  - 4) barang milik lainnya (kode 13).
- b. Kode barang Intrakomptable atau barang Ekstrakomtable meliputi:
  - 1) Barang Intrakomptabel yaitu aset yang memenuhi kriteria kapitalisasi (kode 01);
  - 2) Barang Ekstrakomptabel yaitu berupa aset yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (kode 02).
- c. Kode provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- d. Kode kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- e. Kode pengguna barang untuk daftar barang pengguna atau kode pengelola barang untuk daftar barang pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kode kuasa pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Kode sub kuasa pengguna barang dapat dilakukan pengkodean apabila lokasi Barang Milik Daerah masih berada di bawah kuasa pengguna barang dan dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat kebutuhan pemerintah daerah dan pemberian kode sub lokasi kuasa pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



### 3. Kode Register

Kode register merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal yang diletakkan pada barang yang bersangkutan.

Kode register terdiri dari:



- a. Cara penulisan kode register adalah untuk kode lokasi dan tahun perolehan pada bagian atas, sedangkan untuk kode barang dan nomor urut pendaftaran barang pada bagian bawah.



- a. Nomor urut pendaftaran adalah nomor urut yang diberikan pada setiap jenis barang (sub rincian objek) yang dimulai dari 000001 dan seterusnya.

Contoh1:

Pada tahun 2015 Dinas Kesehatan (kode pengguna barang: 010201) Provinsi X (kode provinsi: 81), telah melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan type station wagon dan sesuai batas kapitalisasi. Pada saat perolehan barang tersebut nomor pendaftaran ke 000002. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Provinsi X dapat memberikan register barang sebagai berikut:

1	1	.	0	1	.	8	1	.	0	0	.	0	1	0	2	0	1	.	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	.	2	0	1	5
1	.	3	.	2	.	0	2	.	0	1	.	0	1	.	0	0	3	.	0	0	0	0	0	2										

Contoh 2 :

Pada tahun 2016 Dinas Kesehatan (kode pengguna barang: 010201) Provinsi X (kode provinsi: 81), telah melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan type station wagon dan sesuai batas kapitalisasi. Pada saat perolehan barang tersebut nomor pendaftaran ke 000003. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Provinsi X dapat memberikan register barang sebagai berikut:

1	1	.	0	1	.	8	1	.	0	0	.	0	1	0	2	0	1	.	0	0	0	0	0	.	0	0	0	0	0	.	2	0	1	6
1	.	3	.	2	.	0	2	.	0	1	.	0	1	.	0	0	3	.	0	0	0	0	0	3										

Contoh 3:

Pada tahun 2016 Dinas Pendidikan (kode pengguna barang: 010101) Kabupaten Z (Kode Kabupaten: 14) Provinsi Y (Kode Provinsi: 35) telah melakukan pembelian sebuah LCD proyektor/Infocus dan sesuai batas kapitalisasi. Pada saat perolehan barang tersebut nomor pendaftaran ke 70 diserahkan di SMPN I Sekar Arum (kode 103). Selanjutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Z dapat memberikan kode register barang sebagai berikut:

1	1	.	0	1	.	3	5	.	1	4	.	0	1	0	1	0	1	.	0	0	1	0	3	.	0	0	0	0	0	.	2	0	1	6
1	.	3	.	2	.	0	5	.	0	1	.	0	5	.	0	4	3	.	0	0	0	0	7	0										



A K U N	K E L O M P O K	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J I E A K N	R I O S N B U C Y B I E A K N	S R U I O B N B - C J S I E U A K B N	U R A I A N
1	5	6	01	01	01	003	Akumulasi Penyusutan Bangun Serah Guna (BSG)
1	5	6	01	01	01	004	Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	5	6	01	01	02		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN
1	5	6	01	01	02	001	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang
1	5	6	01	01	02	002	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.
1	5	6	01	01	02	003	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. <i>ly</i>	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	
<i>BKO</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI BUTON UTARA,

*[Signature]*

H. ABU HASAN